



Rancangan Akhir
RENCANA KERJA
T.A 2024



PEMERINTAH KOTA DUMAI
SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI

JL. TUANKU TAMBUSAI KEL. BAĞAN BESAR TELP. 0765 4300011

FAX 0765 440226KODE POS 28882

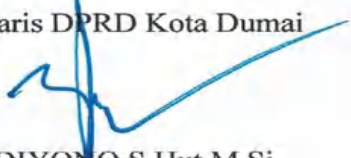
DUMAI

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2024.

Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD sampai dengan akhir tahun anggaran yang berpedoman pada RKPD Kota Dumai Tahun 2024 serta Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Dumai tahun 2021-2026. Renja ini merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja 2024 ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna penyempurnaan Rencana Kerja dimasa yang akan datang.

Dumai, Juli 2023
Sekretaris DPRD Kota Dumai

HADIYONO, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19710605 199903 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i	
Daftar Isi.....	ii	
Daftar Tabel.....	iii	
BAB I	Pendahuluan	
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Dasar Hukum.....	2
1.3	Maksud dan Tujuan.....	4
1.4	Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2022	7
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Renstra	7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	46
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	48
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	50
2.5	Penelaahan Usulan Program	71
BAB III	Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Dumai.....	80
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	80
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai	84
3.3	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	86
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD	117
BAB V	Penutup.....	135
5.1	Kesimpulan	135
5.2	Saran	135

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	28
Tabel 2.2	47
Tabel 2.3	49
Tabel 2.4	53
Tabel 2.5	73
Tabel 3.1	85
Tabel 3.2	95
Tabel 4.1	126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini dibuat dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Peyusunan Renja PD merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis PD (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam penyusunan Renja PD dilakukan pengkajian program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain hasil evaluasi kinerja PD pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra SKPD, usulan dari masyarakat/para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Dengan kata lain renja perangkat daerah 2024 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Disamping itu dalam penyusunan

program/kegiatan juga memperhatikan capaian kinerja SPM yang ada serta pembangunan berperspektif gender yang dilakukan melalui analisis gender.

Penyusunan renja perangkat daerah Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2024 dimulai dari penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan RKPD Kota Dumai Tahun 2024, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024. Rancangan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota, maka rancangan renja perangkat daerah dapat ditetapkan oleh kepala perangkat daerah setelah mendapat pengesahan dari Walikota.

Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Dumai selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2024 ini dilakukan dengan melandaskan diri pada sejumlah aturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026; dan
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2024 ini antara lain adalah:

1. Maksud

Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Sekretariat DPRD Kota Dumai dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun Anggaran 2024.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2024 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2024 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Dumai ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2024, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD tahun 2022 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain : realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai, dan kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Yang kemudian dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Dumai.

BAB III Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Dumai

Bab ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai, serta penjelasan mengenai program dan kegiatan yang terdiri dari faktor-faktor pertimbangan, rekapitulasi, penjelasan rumusan program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, serta tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Dumai

Bab ini menguraikan rancangan akhir rencana kerja dan pendanaan OPD yang disesuaikan dengan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif pada dokumen rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD
KOTA DUMAI TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Renstra

Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai yang diusulkan pada tahun 2022 adalah 2 (dua) program yang terdiri dari 18 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi Pelaksanaan Program:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran jalannya kegiatan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD Kota Dumai. Program ini terdiri dari 10 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 46.339.849.314,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah) dengan realisasi keuangan sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp 33.752.364.530,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dengan sisa anggaran Rp 12.587.484.784,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh delapan puluh empat rupiah).

Keberhasilan Program ini sangat mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat DPRD terkait kegiatan rutin sehingga diharapkan anggota DPRD dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanannya kepada masyarakat.

Namun permasalahannya ada beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya kurang optimal sehingga tahap perencanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan. Untuk itu dihimbau agar penyusunan rencana kegiatan dan

pelaksanaan anggaran diupayakan agar disesuaikan dengan target dan anggaran yang telah ditetapkan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berfungsi untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan dokumen penganggaran, serta penyusunan laporan capaian kinerja dan evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan dengan anggaran jumlah anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 65.778.300,- (enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 62.931.520,- (enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) atau 95,67%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 12 dokumen.
Kegiatan ini telah terlaksana sesuai dengan penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran tercapai sepenuhnya sesuai dengan target dan anggaran yang telah ditetapkan.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang mendukung tersedianya Gaji ASN selama 14 bulan. Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 32.834.978.152,- (tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh

delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 20.854.902.287,- (dua puluh miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 63,51%. Adapun indikator kinerjanya adalah terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan target 95%.

Kegiatan ini dilaksanakan rutin tiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, dihimbau untuk tetap melakukan perencanaan anggaran diupayakan sesuai peraturan yang berlaku sehingga target dan anggaran yang ditetapkan sesuai.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Kegiatan ini mendukung terlaksananya penataan administrasi Barang Milik Daerah. Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 17.767.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau 70,78%. Adapun indikator kinerjanya adalah Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target 95%.

Kegiatan ini belum terlaksana secara maksimal, untuk itu dihimbau kedepannya agar penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran diupayakan menggunakan informasi yang akurat agar penetapan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target kinerja hasil/keluaran dan anggaran yang telah ditetapkan.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah untuk tahun 2022 terdiri dari Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Kegiatan ini guna menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan aparatur di Sekretariat DPRD Kota Dumai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur dalam melayani Anggota DPRD Kota Dumai.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk tahun 2022 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp.138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau 50,36%. Adapun target indikator kinerja keluarannya adalah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 95%.

Kegiatan ini belum terlaksana secara maksimal dikarenakan karena adanya kendala dengan jadwal dan beban kerja aparatur yang padat sehingga pelaksanaan kegiatan hanya diikuti oleh beberapa aparatur saja.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun 2022 terdiri dari Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitasi Kunjungan Tamu, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan ini berfungsi untuk mendukung pelayanan rutin perkantoran Sekretariat DPRD Kota Dumai.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.508.189.100,- (delapan miliar lima ratus delapan juta seratus

delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 8.299.359.834,- (delapan miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) atau 97,55%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 95%.

Kegiatan ini terlaksana melebihi target kinerja yang ditetapkan. Untuk itu perlu tetap diperhatikan pelaksanaan sesuai kebutuhan berdasarkan skala prioritas.

- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun 2022 terdiri dari Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Kegiatan ini mendukung Pengadaan Barang yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Dumai demi menunjang terlaksananya urusan pemerintah daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 453.889.338,- (empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 437.797.300,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) atau 96,45%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 95%.

Kegiatan ini terlaksana melebihi target kinerja yang ditetapkan. Untuk itu perlu tetap diperhatikan pelaksanaan sesuai perencanaan dan kebutuhan berdasarkan skala prioritas.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2022 terdiri dari Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Kegiatan ini dilaksanakan demi menunjang urusan pelayanan Kantor DPRD Kota Dumai.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.201.447.010,- (dua miliar dua ratus satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sepuluh rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 2.064.818.962,- (dua miliar enam puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) atau 93,79%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 95%.

Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik walaupun belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu tetap diperhatikan pelaksanaan sesuai perencanaan dan kebutuhan berdasarkan skala prioritas.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2022 terdiri dari Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Kegiatan ini demi menunjang pemeliharaan barang yang ada di Sekretariat DPRD demi menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 904.199.234,- (sembilan ratus empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dengan realisasi anggaran sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 879.379.925,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) atau 97,26%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 95%.

Kegiatan ini telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dikeluarkan. Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan rutin yang telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai kebutuhan berdasarkan skala prioritas.

i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD pada tahun 2022 terdiri dari Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD. Kegiatan ini untuk mendukung terselenggaranya kesejahteraan Anggota DPRD Kota Dumai.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 560.300.918,- (lima ratus enam puluh juta tiga ratus ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 521.519.500,- (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) atau 93,08%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan target 95%.

Kegiatan ini hampir memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dikeluarkan. Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan rutin yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Untuk itu tetap perlu diperhatikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai kebutuhan.

j. **Layanan Administrasi DPRD**

Kegiatan Layanan Administrasi DPRD tahun 2022 terdiri dari Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD. Kegiatan ini demi mendukung terlaksananya Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Dumai dan Paripurna Pembukaan masa Persidangan.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 510.967.262,- (lima ratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam dua rupiah) dengan realisasi anggaran sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 475.388.202,- (empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah) atau 93,04%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD dengan target 95%.

Kegiatan ini belum terlaksana sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Untuk itu perlu tetap diperhatikan pelaksanaan sesuai perencanaan dan kebutuhan berdasarkan skala prioritas.

2. **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**

Realisasi Pelaksanaan Program:

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD berfungsi untuk mendukung kegiatan pelayanan Sekretariat DPRD. Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan anggaran Rp. 9.953.645.407,00 (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu

empat ratus tujuh rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.932.354.057,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah) dan sisa anggaran untuk program ini yaitu Rp1.021.291.350,00 (satu miliar dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Program ini berfungsi untuk mendukung kegiatan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Dumai melalui kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, Pembahasan Kerja Sama Daerah, dan Fasilitasi Tugas DPRD.

Hingga akhir Desember 2022 penyerapan anggaran pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar 89,74%, realisasi program tersebut termasuk tinggi. Untuk itu, untuk kedepannya diupayakan/diusulkan perencanaan kegiatan yang dibutuhkan lebih disusun berdasarkan pada skala prioritas, serta meningkatkan koordinasi dengan baik secara intern.

Program ini berhubungan secara langsung dengan kegiatan Anggota DPRD Kota Dumai dengan tujuan antara lain:

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Pada tahun 2022 kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, dan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.437.604.330,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta

enam ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 1.297.955.960,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atau 90,29% dan sisa anggaran sebesar Rp. 139.648.370,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan target 95%.

Kegiatan ini hampir memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang ditetapkan dikarenakan pelaksanaan kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD sesuai prioritas. Untuk itu, kedepannya diupayakan/diusulkan perencanaan kegiatan yang dibutuhkan agar disusun berdasarkan pada skala prioritas.

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Pada tahun 2022 kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan APBD Perubahan, Pembahasan Laporan Semester, dan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 973.979.940,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 814.579.799,00 (delapan ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 83,63% dan sisa anggaran sebesar Rp. 159.400.141,00 (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu seratus empat puluh satu rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan target 95%.

Kegiatan ini memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dikeluarkan dikarenakan pelaksanaan kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD sesuai prioritas. Sehingga pelaksanaan kegiatan masih membutuhkan waktu maka kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pada tahun 2022 kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam, Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Pengawasan Penggunaan Anggaran, dan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 692.818.400,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 481.769.632,00 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) atau 69,54% dan sisa anggaran sebesar Rp. 211.048.768,00 (dua ratus sebelas juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan target 95%.

Kegiatan ini memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dikeluarkan walaupun terdapat perubahan dalam peraturan dari instansi Pusat dalam perencanaan dan penganggaran sehingga beberapa subkegiatan belum

jelas target kinerjanya. Sehingga masih terdapat keraguan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya.

4. Peningkatan Kapasitas DPRD

Pada tahun 2022 kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan Pendalaman Tugas DPRD, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.300.090.666,00 (satu miliar tiga ratus juta sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 976.076.441,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) atau 75,08% dan sisa anggaran sebesar Rp. 324.014.225,00 (tiga ratus dua puluh empat juta empat belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD dengan target 95%.

Kegiatan ini terlaksana sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu tetap diperhatikan pelaksanaan sesuai perencanaan dan kebutuhan berdasarkan skala prioritas.

5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Pada tahun 2022 kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan Pelaksanaan Reses.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.746.879.400,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.609.202.255,00 (dua miliar enam ratus sembilan juta dua ratus dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) atau

94,99% dan sisa anggaran sebesar Rp. 137.677.145,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan target 95%. Kegiatan ini memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang ditetapkan. Untuk itu perencanaan tahun depan perlu tetap diperhatikan sesuai perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan skala prioritas dan koordinasi dengan baik secara intern.

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Pada tahun 2022 kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 149.134.200,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 140.673.095,00 (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah) atau 94,33% dan sisa anggaran sebesar Rp. 8.461.105,00 (delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus lima rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terselenggaranya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan target 95%.

Kegiatan ini memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang ditetapkan. Untuk itu perencanaan tahun depan perlu tetap diperhatikan sesuai perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan skala prioritas dan koordinasi dengan baik secara intern.

7. Pembahasan Kerja Sama Daerah

Pada tahun 2022 kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 498.390.400,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 476.052.741,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) atau 95,52% dan sisa anggaran sebesar Rp. 22.337.659,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terselenggaranya Pembahasan Kerja Sama Daerah dengan target 95%. Kegiatan ini memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang ditetapkan. Untuk itu perencanaan tahun depan perlu tetap diperhatikan sesuai perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan skala prioritas dan koordinasi dengan baik secara intern.

8. Fasilitasi Tugas DPRD

Pada tahun 2022 kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, dan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.154.748.071,00 (dua miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh satu rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 2.136.044.134,00 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah) atau 99,13% dan sisa anggaran sebesar Rp. 18.703.937,00 (delapan belas juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD dengan target 95%.

Kegiatan ini memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang ditetapkan. Untuk itu perencanaan tahun depan perlu tetap diperhatikan sesuai perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan skala prioritas dan koordinasi dengan baik secara intern.

Adapun penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Eksistensi Sekretariat DPRD kedudukannya semakin baik dan strategis melalui Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
- b. Terjalannya hubungan yang harmonis serta komunikasi yang baik antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai dan;
- d. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Adapun beberapa penyebab kegagalan / penurunan kinerja dapat dikarenakan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan – perubahan yang terjadi.
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
- d. Belum tersedianya standar / manual / pedoman / aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas tugas kedewanan.

Selain itu analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dibagi ke dalam 2 (dua) batasan yakni internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) Sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan:

a. Kekuatan (strengths)

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Eksistensi Sekretariat DPRD kedudukannya semakin baik dan strategis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2) Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 3) Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai; dan
- 4) Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

b. Kelemahan

Pada sisi kelemahan terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Belum optimalnya sumberdaya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan yang terjadi;
- 2) Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia; dan

- 4) Belum tersedianya standar / manual / pedoman / aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan.

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan:

a. Peluang (Opportunities)

Pada sisa peluang terhadap faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD ;
- 2) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
- 3) Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah;
- 4) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 5) Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

b. Tantangan / Ancaman (threats)

Pada sisi tantangn / ancaman, terhadap faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Cepatnya perubahan instrumen penyelenggara pemerintah daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari pemerintah pusat;
- 2) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD; dan

- 3) Masih banyaknya hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

Pada tahun 2022, Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Dumai adalah sebesar Rp. 56.293.494.721,00 dengan rincian Belanja Operasi Rp. 55.867.605.383,00 dengan serapan Tahun 2022 sebesar Rp. 42.274.329.137,00 atau 75,67% sedangkan Belanja Modal sebesar Rp.425.889.338,00 dengan serapan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 410797.300,- atau 96,46%.

Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh ASN yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Dumai dan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait, hal ini disebabkan kegiatan ini bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Berdasarkan tujuan DPRD yaitu “Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)” dengan sasaran DPRD yaitu “Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)” maka Indikator Kinerja Utama (IKU) DPRD adalah Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT, Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD.

Dengan realisasi anggaran pada tahun 2022 ini maka capaian IKU Sekretariat DPRD Kota Dumai adalah sebagai berikut:

➤ **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

➤ **Kegiatan:**

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.437.604.330,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 1.297.955.960,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atau 90,29% dan sisa anggaran sebesar Rp. 139.648.370,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan target 95%.

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 973.979.940,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 814.579.799,00 (delapan ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 83,63% dan sisa anggaran sebesar Rp. 159.400.141,00 (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu seratus empat puluh satu rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan target 95%.

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 692.818.400,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi keuangan

sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 481.769.632,00 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) atau 69,54% dan sisa anggaran sebesar Rp. 211.048.768,00 (dua ratus sebelas juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan target 95%.

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.300.090.666,00 (satu miliar tiga ratus juta sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 976.076.441,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) atau 75,08% dan sisa anggaran sebesar Rp. 324.014.225,00 (tiga ratus dua puluh empat juta empat belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD dengan target 95%.

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.746.879.400,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.609.202.255,00 (dua miliar enam ratus sembilan juta dua ratus dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) atau 94,99% dan sisa anggaran sebesar Rp. 137.677.145,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan target 95%.

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 149.134.200,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 140.673.095,00 (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah) atau 94,33% dan sisa anggaran sebesar Rp. 8.461.105,00 (delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus lima rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terselenggaranya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan target 95%.

g. Pembahasan Kerja Sama Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 498.390.400,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 476.052.741,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) atau 95,52% dan sisa anggaran sebesar Rp. 22.337.659,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terselenggaranya Pembahasan Kerja Sama Daerah dengan target 95%.

h. Fasilitasi Tugas DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.154.748.071,00 (dua miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh satu rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 2.136.044.134,00 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah) atau 99,13% dan sisa anggaran sebesar Rp. 18.703.937,00 (delapan belas juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD dengan target 95%.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Sekretariat DPRD Kota Dumai s/d Tahun 2023

Sekretariat DPRD Kota Dumai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Pada Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (Outcome) dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan/ Sub kegiatan (Renja Tahun 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan / Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Relisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Sekretariat DPRD	100%							

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2024

4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	12 dokumen	14 dokumen	88%
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	4 laporan	7 dokumen	6 dokumen	86%		6 dokumen	200%
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	50%
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen							
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	50%

4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen							
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2 dokumen	2 laporan	2 laporan	100%	2 dokumen	4 dokumen	100%
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan							
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	11 dokumen		100%	100%	100%	95%	195%	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	28 bulan	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen							

4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan							
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan							
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen							
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10 laporan		90%	27%	30%	95%	122%	
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen							
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen							

5.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan							
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan							
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan		90%	27%	30%	3 laporan	3 laporan	150%
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 dokumen		100%	90%	90%	95%	185%	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket							
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen							
4.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen							

4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen							
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	40 orang	50 orang	45 orang	90%	50 orang	135 orang	900%
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	86 orang							
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 dokumen		100%	100%	100%	95%	195%	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300%
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	200%
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket					12 bulan	12 bulan	100%
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300%

4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300%
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	14 media	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 paket							
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52 unit		100%	90%	90%	95%	185%	
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit		1 unit	1 unit	100%		1 unit	100%

4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	3 unit					3 unit	300%
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	5 unit	14 unit	10 unit	71%		15 unit	100%
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	33 unit	12 bulan	12 bulan	100%	25 unit	58 unit	232%
4.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 unit							
4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit							
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 unit					1 paket	1 paket	
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit		12 bulan	12 bulan	100%	1 paket	1 paket	

4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 laporan		100%	100%	100%	95%	195%	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 laporan	8 even	4 dekorasi/even	4 dekorasi/even	100%		12 even	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168 unit		100%	97%	97%	95%	192%	

4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit							
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	20 unit	33 unit	33 unit	100%	12 bulan	53 unit	530%
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 unit							
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit					12 bulan	12 bulan	
4.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit							
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	80%				1 paket	1 paket	

4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		100%	95%	95%	3 paket	3 paket	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit		12 bulan	12 bulan	100%	1 paket	1 paket	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	35 orang		100%	100%	100%	95%	195%	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 OB							
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 paket	240 Stell	150 stell	150 stell	100%	150 stell	540 stell	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	35 orang					30 orang	30 orang	86%
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD	12 dokumen		100%	100%	100%	95%	195%	

4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	6 dokumen	34 paripurna	6 paripurna	6 paripurna	100%	9 paripurna	49 paripurna	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 laporan							
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 laporan							
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 paket							
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%							
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	21 dokumen		100%	60%	60%	95%	155%	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 dokumen		8 pansus	4 panusus	50%	4 pansus	8 pansus	

4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 dokumen	8 perda	12 pansus	9 pansus	75%	11perda	19 perda	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen		5 kajian	3 kajian	60%	4 kajian	7 kajian	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 dokumen		5 kajian	2 kajian	40%	5 kajian	7 kajian	
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen							
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	7 dokumen		100%	100%	100%	95%	195%	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	1 Nota Kesepakatan/ 5 sidang	6 Nota Kesepakatan/ sidang	6 Nota Kesepakatan/ sidang	100%	1 Nota kesepakatan	3 Nota kesepakatan	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	1 Nota Kesepakatan/ 5 sidang	6 Nota Kesepakatan/ sidang	6 Nota Kesepakatan/ sidang	100%	1 Nota kesepakatan	3 Nota kesepakatan	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	1 Perda/ 4 sidang	5 Perda/ sidang	5 Perda/ sidang	100%	1 perda	3 Perda	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2024

4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	1 Perda/ 4 sidang	5 Perda/ sidang	5 Perda/ sidang	100%	1 perda	3 Perda	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 laporan	4 Laporan	200%
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	1 Nota Kesepakatan/perda/ 4 sidang	5 Nota Kesepakatan/ Perda/Sidang	5 Nota Kesepakatan/ Perda/Sidang	100%	1 perda	3 Perda	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	8 dokumen		100%	33%	33%	95%	128%	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 laporan		12 bulan	5 bulan	42%	12 bulan	17 bulan	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 laporan		12 bulan			12 bulan	12 bulan	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 laporan		12 bulan			12 bulan	12 bulan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2024

4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 laporan		12 bulan	7 bulan	58%	12 bulan	19 bulan	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 laporan		12 bulan	5 bulan	42%	12 bulan	17 bulan	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen		12 bulan	7 bulan	58%	12 bulan	19 bulan	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 dokumen		12 bulan			12 bulan	12 bulan	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen		12 bulan	8 bulan	67%	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	7 dokumen		100%	100%	100%	95%	195%	

4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen							
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 dokumen	30 orang	150 kali/orang	150 kali/orang	100%	150 kali/orang	330 kali/orang	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 dokumen							
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	16 orang		12 orang	12 orang	100%	12 orang	24 orang	150%
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	10 orang		14 orang	14 orang	100%	14 orang	28 orang	280%
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 dokumen							
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen							
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen/laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5 dokumen		100%	100%	100%	95%	195%	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2024

4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan							
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	4 kegiatan	1 dokumen/ 3 pertemuan/ 5 kegiatan	1 dokumen/ 3 pertemuan/ 5 kegiatan	100%	5 kegiatan	14 kegiatan	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	9 kegiatan	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 dokumen		100%	100%	100%	95%	195%	
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen							
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan		1 AKD	1 AKD	100%	1 AKD	2 AKD	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah	2 Dokumen		100%	100%	100%	95%	195%	
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 dokumen							

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2024

4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 dokumen		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	10 dokumen		100%	82%	82%	95%	177%	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 dokumen	9Kab/kota	9Kab/kota	9Kab/kota	100%	12 bulan	12 bulan	
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan							
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 dokumen		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 dokumen		12 bulan	6 bulan	50%	12 bulan	18 bulan	
4.02.02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	5 dokumen							

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD Kota Dumai mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Dumai sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Lingkungan kinerja Sekretariat DPRD pada umumnya kental dengan nuansa politik merupakan salah satu kendala dalam menerapkan berbagai peraturan dan prosedur administrasi dan manajerial yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal tersebut juga menjadi kendala dalam memaksimalkan elemen penting untuk menunjang kinerja organisasi.

Perubahan dan kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD berkaitan erat dengan reposisi dan refungsional DPRD sebagai Badan Legislatif daerah yang menjadi salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah mendukung DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Seiring dengan kemajuan diberbagai bidang kehidupan termasuk perkembangan teknologi informasi, perkembangan regulasi dan peraturan perundangan-undangan, peran Sekretariat DPRD diharapkan tidak hanya sebagai fasilitas pendukung pelayanan administrasi saja, melainkan lebih diarahkan sebagai

pendukung pelayanan substantif dan sumber inspirasi lembaga legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran *public relation*, dengan selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan keharmonisan hubungan antar lembaga sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dengan demikian, dimasa yang akan datang Sekretariat DPRD Kota Dumai perlu melakukan restrukturisasi kelembagaan secara menyeluruh untuk mendukung terciptanya struktur pelayanan yang adaptif, selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan.

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Dumai berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dapat digambarkan pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai

No	Indikator	Satuan	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
01	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	95	95	100	95	96	97	99	
02	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada/tidak	ada	ada	ada	Ada	Ada	ada	ada	

03	<p>Terusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan</p>	Ada/tidak	ada	ada	ada	Ada	Ada	ada	ada	
04	<p>Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD</p>	Ada/tidak	ada	ada	ada	Ada	Ada	ada	ada	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Perubahan dan penyesuaian kelembagaan di jajaran Pemerintah Kota Dumai salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Hal ini merupakan tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab sebagai implementasi asas desentralisasi. Tuntutan adanya peningkatan kemampuan dan kebutuhan profesionalitas aparat yang memiliki kompetensi menjadi hal yang mutlak. Tersedianya aparat yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, merupakan faktor penting dalam rangka mewujudkan profesionalitas aparatur pemerintah daerah.

Terwujudnya aparat yang profesional diindikasikan dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Di samping itu, terciptanya efektivitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan tentunya akan dapat semakin meningkatkan kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Termasuk dengan pemanfaatan teknologi informatika dalam layanan dan informasi pelaksanaan tugas.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang semakin memadai merupakan salah satu indikator berjalannya pelayanan OPD dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya sangat berkaitan erat dengan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan mendesak harus dapat dipenuhi demi terwujudnya pelayanan prima.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, tidak dapat dihindari adanya permasalahan dan hambatan yang patut diperhatikan dan diatasi sehingga tidak menjadi semakin besar dan pada akhirnya akan menghambat pencapaian target kinerja OPD. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan
Sekretariat DPRD Kota Dumai

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penyelesaian tugas dan fungsi yang tumpang tindih	Penempatan sumber daya manusia tidak sesuai bidang keahliannya	terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten

2.	Administrasi baik dibidang sekretariat maupun keuangan kurang terakomodir	Kurangnya sumber daya manusia	Kurang optimalnya administrasi kesekretariatan maupun administrasi keuangan
3.	Pelayanan dan fasilitasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Dumai belum optimal	pelayanan dan fasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai belum prima	Kurang optimalnya pelayanan dan fasilitasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Dumai
4.	Informasi sering tidak tersampaikan dengan baik	Kurangnya koordinasi dan kerjasama intern maupun ekstern	Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama baik intern maupun ekstern

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusunlah Rancangan Awal Rencana Kerja

(Renja) Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2024 berdasarkan aturan yang berlaku. Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan Rancangan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024 sesuai dengan pagu indikatif Rankhir RKPD Kota Dumai Tahun 2024.

Memerhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah digunakan sebagai acuan baku bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah tahun anggaran 2024, Pemerintah Daerah melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sesuai lampiran peraturan menteri tersebut. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur digunakan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Tahapan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2024 merupakan penjabaran dari misi dan sasaran pembangunan yang diambil dari penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan Rancangan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Dumai. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan merupakan cerminan dari tingkat urgensi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengaturan waktu dan pengadaan dana.

Dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2024, perlu dilakukan perbandingan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Dumai dengan hasil analisis kebutuhan yang diberikan oleh masing-masing bidang di Sekretariat DPRD Kota Dumai. Hal ini dilakukan agar penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan pada saat itu dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Beberapa sub kegiatan belum akan dilaksanakan tahun 2024 sehingga dihapuskan dari pemetaan Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai. Adapun pemetaan Rancangan akhir Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Sekretariat DPRD Kota Dumai

No. Rek	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					69.401.269.262					82.126.421.801	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sek. DPRD Kota Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Sekretariat DPRD	100%	55.060.082.179	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sek. DPRD Kota Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Sekretariat DPRD	100%	58.315.065.333	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Pengganaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 dokumen	155.000.000	Perencanaan, Pengganaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 dokumen	155.000.000	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	15.000.000	
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	15.000.000	

4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	15.000.000	
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	25.000.000	
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	25.000.000	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	30.000.000	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000	

4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12 dokumen	5.610.375.450	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12 dokumen	6.286.125.450	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	5.521.625.450	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	6.221.625.450	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	15.375.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	15.375.000	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	15.375.000	
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	15.375.000	
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	18.375.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	18.375.000	

5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 laporan	81.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 laporan	81.000.000	
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	15.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	15.000.000	
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	25.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	25.000.000	
5.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan	13.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan	13.000.000	
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	13.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan	13.000.000	
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	15.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	15.000.000	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 dokumen	367.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 dokumen	856.897.250	

4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	
4.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	67.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	67.500.000
4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	280.000.000
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43 orang	150.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	86 orang	509.397.250
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 dokumen	9.160.852.877	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 dokumen	9.200.692.877

4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	200.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	200.000.000	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	218.741.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	218.741.400	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	200.000.000	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	280.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	280.000.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	241.400.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	241.400.000	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	90.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	129.840.000	
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 paket	35.000.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 paket	35.000.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	230.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	230.000.000	

4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	7.665.711.477	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	7.665.711.477	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44 unit	3.500.416.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44 unit	4.701.160.600	
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	125.208.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	961.896.000	
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	125.208.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	125.208.000	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	1.000.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	1.000.000.000	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	1.500.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	1.500.000.000	
4.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 unit	-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 unit	-	
4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	

4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	500.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	500.000.000	
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	250.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	614.056.600	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 laporan	2.744.567.660	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 laporan	2.744.567.660	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.140.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.140.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	480.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	480.000.000	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 laporan	50.000.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	2.204.427.660	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	2.204.427.660	

4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127 unit	4.544.762.446	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127 unit	4.949.230.000	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	194.230.000	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	275.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	275.000.000	
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 unit	25.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 unit	-	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	300.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	300.000.000	
4.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit	5.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit	-	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	3.219.762.446	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	3.500.000.000	

4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	350.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	350.000.000	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	330.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	330.000.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	35 orang	27.555.409.306	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	35 orang	27.995.659.306	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 OB	26.145.409.306	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 OB	26.145.409.306	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 paket	1.200.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 paket	1.200.000.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	35 orang	210.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	35 orang	650.250.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD	13 dokumen	1.340.198.440	Layanan Administrasi DPRD		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD	13 dokumen	1.344.732.190	

4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	6 dokumen	1.190.198.440	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	6 dokumen	1.190.198.440	Penambahan penyelenggaraan paripurna istimewa pelantikan dewan baru, pengangkatan sumpah, paripurna kepala daerah baru
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 laporan	50.000.000	Fasilitasi Fraksi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 laporan	154.533.750	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 laporan	50.000.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 laporan		
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 paket	50.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 paket		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	14.341.187.083	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	23.811.356.468	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	21 dokumen	1.954.000.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	21 dokumen	3.542.681.080	

4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 dokumen	480.000.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 dokumen	1.313.542.000	Penambahan kebutuhan SPPD, makan minum rapat akibat bertambahnya kursi anggota Dewan
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 dokumen	649.000.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 dokumen	832.990.000	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	215.000.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	594.092.000	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 dokumen	385.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 dokumen	627.057.080	
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	175.000.000	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	175.000.000	
4.02.02.2.01.06	Sosialisasi Perda yg dilakukan oleh DPRD & Pemda		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	50 orang	50.000.000	Sosialisasi Perda yg dilakukan oleh DPRD & Pemda		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	50 orang	50.000.000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	7 dokumen	1.439.000.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	7 dokumen	1.439.000.000	

4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	100.000.000	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	100.000.000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	180.000.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	180.000.000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	304.000.000	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	304.000.000	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	235.000.000	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	235.000.000	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 dokumen	160.000.000	Pembahasan Laporan Semester		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 dokumen	160.000.000	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	460.000.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	460.000.000	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	8 dokumen	777.700.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	8 dokumen	838.338.200	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 laporan	66.750.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 laporan	66.750.000	Penambahan kebutuhan SPPD, makan minum rapat akibat

4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 laporan	66.750.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 laporan	66.750.000	bertambahnya kursi anggota Dewan
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 laporan	67.200.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 laporan	67.200.000	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 laporan	65.700.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 laporan	65.700.000	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 laporan	60.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 laporan	60.000.000	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	85.000.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	85.000.000	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 dokumen	76.300.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 dokumen	76.300.000	

4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	290.000.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	350.638.200	Penambahan kebutuhan SPPD, makan minum rapat akibat bertambahnya kursi anggota Dewan
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Dokumen/Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	10 dokumen	2.753.022.500	Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Dokumen/Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	10 dokumen	3.031.160.595	
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	500.000.000	Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	500.000.000	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 dokumen	1.500.000.000	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 dokumen	1.701.138.095	Kebutuhan Pendalaman Tugas DPRD
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	16 orang	133.022.500	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	16 orang	133.022.500	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	10 orang	380.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	10 orang	480.000.000	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 dokumen	25.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 dokumen	192.000.000	Kebutuhan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	25.000.000	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	25.000.000	

4.02.02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 dokumen	190.000.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 dokumen	1.340.713.000	Kebutuhan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah Dokumen/laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5 dokumen	3.108.600.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah Dokumen/laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5 dokumen	5.779.833.948	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	25.000.000	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	50.000.000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	522.600.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	522.600.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	2.511.000.000	Pelaksanaan Reses		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	5.207.233.948	Penambahan kebutuhan Reses Dewan akibat bertambahnya anggota Dewan baru
4.02.02.2.05.04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	50 orang	50.000.000	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	50 orang	50.000.000	

4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 dokumen	372.015.314	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 dokumen	682.545.945	
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	122.420.445	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	410.893.445	Kebutuhan dalam Penyusunan Kode Etik DPRD
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	249.594.869	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	271.652.500	Kebutuhan dalam Pengawasan Kode Etik DPRD
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah	2 Dokumen	425.000.000	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah	2 Dokumen	995.839.000	
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 dokumen	25.000.000	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 dokumen	25.000.000	
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 dokumen	400.000.000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 dokumen	970.839.000	bertambahnya anggaran untuk Komunikasi dan Publikasi akibat penambahan anggota Dewan

4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	10 dokumen	3.511.849.269	Fasilitasi Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	10 dokumen	7.501.957.700	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 dokumen	1.461.147.269	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 dokumen	1.573.838.700	
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	25.375.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	25.375.000	
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 dokumen	366.812.500	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 dokumen	366.812.500	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 dokumen	806.389.500	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 dokumen	806.389.500	
4.02.02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	5 dokumen	852.125.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	5 dokumen	4.729.542.000	Penambahan kebutuhan SPPD, makan minum rapat akibat bertambahnya kursi anggota Dewan

2.5 Penelaahan Usulan Program

Sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. Sekretariat DPRD Kota Dumai merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang melaksanakan tugas secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Sekretariat DPRD Kota Dumai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD pada bidang umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, keprotokolan dan humas serta perpustakaan;
2. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada bidang pembentukan Peraturan Daerah, penganggaran dan pengawasan;
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, hak, dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah dan dengan memperhatikan amanat Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, Sekretariat DPRD Kota Dumai menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam Menyusun Rancangan RKPD Sekretariat DPRD Kota Dumai berdasarkan masukan/usulan dari bidang-bidang terkait yang memiliki kepentingan sesuai tupoksi bidang masing-masing di Sekretariat DPRD Kota Dumai. Pelaksanaan penyusunan Rancangan Awal RKPD Sekretariat DPRD Kota Dumai juga memperhatikan tugas pokok dan fungsi bidang-bidang terkait.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kota Dumai

Sekretariat DPRD Kota Dumai

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sek. DPRD Kota Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Sekretariat DPRD	100%	
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 dokumen	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12 dokumen	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 laporan	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	
04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 dokumen	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	86 orang	
05	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 dokumen	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 paket	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44 unit	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 laporan	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	

08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127 unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	
09	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	35 orang	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 OB	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 paket	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	35 orang	
10	Layanan Administrasi DPRD		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD	13 dokumen	
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	6 dokumen	
	Fasilitasi Fraksi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 laporan	
II.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	
01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	21 dokumen	

	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 dokumen	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 dokumen	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 dokumen	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	
	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	50 Orang	
02	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	7 dokumen	
	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	
	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	
	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	
	Pembahasan Laporan Semester		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 dokumen	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	
03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	8 dokumen	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 laporan	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 laporan	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 laporan	

	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 laporan	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 laporan	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 dokumen	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	
04	Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Dokumen/Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	10 dokumen	
	Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	
	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 dokumen	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	16 orang	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	10 orang	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 dokumen	
	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 dokumen	
05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah Dokumen/laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5 dokumen	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	
	Pelaksanaan Reses		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	
	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	50 orang	
06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 dokumen	

	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	
	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	
07	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah	2 Dokumen	
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 dokumen	
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 dokumen	
08	Fasilitasi Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	10 dokumen	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 dokumen	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 dokumen	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 dokumen	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	5 dokumen	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD
KOTA DUMAI

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, Sekretariat DPRD Kota Dumai merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang melaksanakan tugas secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Sekretariat DPRD Kota Dumai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD pada bidang umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, keprotokolan dan humas serta perpustakaan;
2. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada bidang pembentukan Peraturan Daerah, penganggaran dan pengawasan;
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, hak, dan wewenang DPRD.

Penetapan prioritas program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai perlu diselaraskan dengan perkembangan makro ekonomi dan perkembangan kehidupan nasional secara umum. Sedangkan perkembangan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap tri fungsi DPRD (fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan), yang dijadikan landasan terhadap penyusunan prioritas program kerja. Karena itu perencanaan program yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman, terhadap beberapa program yang masih perlu dilanjutkan, dikembangkan, bahkan diperluas cakupannya.

Adapun Program yang berfungsi mendukung kegiatan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Dumai yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yaitu sebagai berikut:

- 1.1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
 - 1.1.1 Subkegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - 1.1.2 Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - 1.1.3 Subkegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

- 1.1.4 Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
- 1.1.5 Subkegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD
- 1.1.6 Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

- 1.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran, kegiatan ini terdiri dari :
 - 1.2.1 Subkegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
 - 1.2.2 Subkegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 1.2.3 Subkegiatan Pembahasan APBD
 - 1.2.4 Subkegiatan Pembahasan APBD Perubahan
 - 1.2.5 Subkegiatan Pembahasan Laporan Semester
 - 1.2.6 Subkegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

- 1.3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan ini terdiri dari:
 - 1.3.1 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
 - 1.3.2 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - 1.3.3 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 1.3.4 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - 1.3.5 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam

- 1.3.6 Subkegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- 1.3.7 Subkegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
- 1.3.8 Subkegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

- 1.4 Peningkatan Kapasitas DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
 - 1.4.1 Subkegiatan Orientasi DPRD
 - 1.4.2 Subkegiatan Pendalaman Tugas DPRD
 - 1.4.3 Subkegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - 1.4.4 Subkegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - 1.4.5 Subkegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - 1.4.6 Subkegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
 - 1.4.7 Subkegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan

- 1.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, kegiatan ini terdiri dari :
 - 1.5.1 Subkegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah
 - 1.5.2 Subkegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - 1.5.3 Subkegiatan Pelaksanaan Reses
 - 1.5.4 Subkegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah

- 1.6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, kegiatan ini terdiri dari:
 - 1.6.1 Subkegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD
 - 1.6.2 Subkegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD

- 1.7 Pembahasan Kerja Sama Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 - 1.7.1 Subkegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
 - 1.7.2 Subkegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

- 1.8 Fasilitasi Tugas DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
 - 1.8.1 Subkegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - 1.8.2 Subkegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - 1.8.3 Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - 1.8.4 Subkegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
 - 1.8.5 Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD, maupun dalam rangka kerja sama dalam masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program/kegiatan/subkegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah serta kinerjanya. Keberhasilan program/kegiatan/subkegiatan yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program/kegiatan/subkegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut pula dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2021-2016 kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan yang dijabarkan kembali dalam subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan idnikatif. Oleh karena itu, sebelum mengarah dalam penjabaran lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan perlu dilakukan sinkronisasi antara tujuan, sasaran, dan strategi sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)			
MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur, serta sarana dan prasarana dalam memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Dumai	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kota Dumai

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan Tujuan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Dumai adalah :

Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan) dengan sasaran Sekretariat DPRD Kota Dumai adalah Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan). Adapun indikator capaiannya adalah :

- a. Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan target akhir tahun 2026 yaitu 100%.
- b. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT dengan target akhir tahun 2026 yaitu Ada.
- c. Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan dengan target akhir tahun 2026 yaitu Ada.
- d. Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD dengan target akhir tahun 2026 yaitu Ada.

3.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Memperhatikan masalah-masalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka pelayanan atas tugas pokok dan fungsi DPRD dapat mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, khususnya juga agar

dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Kota Dumai, maka ditentukan strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam rencana kerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Dumai yakni mencakup 2 program, 18 kegiatan dan 97 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana sebesar Rp. 69.401.269.262,00 yaitu untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.55.060.082.179,00 dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp.14.341.187.083,00, yang mana rincian kegiatan/sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan rutin yang menunjang urusan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain:

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 - 1.1.1 Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- 1.1.6 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.7 Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari:
 - 1.2.1 Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.4 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 1.2.5 Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 - 1.3.1 Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.2 Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.3 Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :

- 1.4.1 Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4.2 Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 1.4.3 Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4.4 Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari:
- 1.5.1 Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2 Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3 Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4 Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.5 Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.6 Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.5.7 Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - 1.5.8 Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.5.9 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 - 1.6.1 Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2 Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.3 Subkegiatan Pengadaan Mebel
 - 1.6.4 Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.5 Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 - 1.7.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 - 1.8.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.8.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.8.3 Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.8.4 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.8.5 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.8.6 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.9 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, kegiatan ini terdiri dari :

1.9.1 Subkegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

1.9.2 Subkegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

1.9.3 Subkegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

1.10 Layanan Administrasi DPRD, kegiatan ini terdiri dari :

1.10.1 Subkegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD

1.10.2 Subkegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui peningkatan

keputusan/Perda yang ditetapkan oleh DPRD. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain:

2.1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, kegiatan ini terdiri dari :

2.1.1 Subkegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

2.1.2 Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

2.1.3 Subkegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

2.1.4 Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

2.1.5 Subkegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD

2.1.6 Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

2.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran, kegiatan ini terdiri dari :

2.2.1 Subkegiatan Pembahasan KUA dan PPAS

2.2.2 Subkegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

2.2.3 Subkegiatan Pembahasan APBD

2.2.4 Subkegiatan Pembahasan APBD Perubahan

2.2.5 Subkegiatan Pembahasan Laporan Semester

2.2.6 Subkegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

2.3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan ini terdiri dari :

- 2.3.1 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
 - 2.3.2 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - 2.3.3 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 2.3.4 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - 2.3.5 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 - 2.3.6 Subkegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - 2.3.7 Subkegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - 2.3.8 Subkegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 2.4 Peningkatan Kapasitas DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
- 2.4.1 Subkegiatan Orientasi DPRD
 - 2.4.2 Subkegiatan Pendalaman Tugas DPRD
 - 2.4.3 Subkegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - 2.4.4 Subkegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - 2.4.5 Subkegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - 2.4.6 Subkegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
 - 2.4.7 Subkegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan

- 2.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, kegiatan ini terdiri dari :
 - 2.5.1 Subkegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah
 - 2.5.2 Subkegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - 2.5.3 Subkegiatan Pelaksanaan Reses
 - 2.5.4 Subkegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah

- 2.6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
 - 2.6.1 Subkegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD
 - 2.6.2 Subkegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD

- 2.7 Pembahasan Kerja Sama Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 - 2.7.1 Subkegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
 - 2.7.2 Subkegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

- 2.8 Fasilitasi Tugas DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
 - 2.8.1 Subkegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - 2.8.2 Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - 2.8.3 Subkegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
 - 2.8.4 Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

Tabel 3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KOTA DUMAI

Sekretariat DPRD Kota Dumai

No. Rek	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					69.401.269.262				70.279.156.628
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Sekretariat DPRD	Sek. DPRD Kota Dumai	100%	55.060.082.179			100%	53.508.181.314
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		16 dokumen	155.000.000			16 dokumen	155.000.000

4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dokumen	15.000.000	Dana Alokasi Umum		3 dokumen	15.000.000
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 dokumen	15.000.000	Dana Alokasi Umum		2 dokumen	15.000.000
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2 dokumen	15.000.000	Dana Alokasi Umum		2 dokumen	15.000.000
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 dokumen	25.000.000	Dana Alokasi Umum		2 dokumen	25.000.000
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 dokumen	25.000.000	Dana Alokasi Umum		2 dokumen	25.000.000

4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	30.000.000	Dana Alokasi Umum		4 Laporan	30.000.000
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	30.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Laporan	30.000.000
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah		12 dokumen	5.610.375.450			12 dokumen	6.162.537.995
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45 Orang/bulan	5.521.625.450	Dana Alokasi Umum		45 Orang/bulan	6.073.787.995
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 dokumen	15.375.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	15.375.000

4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan	25.000.000	Dana Alokasi Umum		2 Laporan	25.000.000
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		7 Laporan	30.000.000	Dana Alokasi Umum		7 Laporan	30.000.000
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 dokumen	18.375.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	18.375.000
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		5 laporan	81.000.000	-	-	5 laporan	81.000.000

5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 dokumen	15.000.000	Dana Alokasi Umum		2 dokumen	15.000.000
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	25.000.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	25.000.000
5.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	13.000.000	Dana Alokasi Umum		1 laporan	13.000.000
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	13.000.000	Dana Alokasi Umum		2 Laporan	13.000.000
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 laporan	15.000.000	Dana Alokasi Umum		2 laporan	15.000.000

4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 dokumen	367.500.000	-	-	4 dokumen	757.500.000
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 paket	-	Dana Alokasi Umum		1 paket	
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 dokumen	-	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	50.000.000
4.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 dokumen	67.500.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	67.500.000
4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 dokumen		Dana Alokasi Umum		1 dokumen	25.000.000

4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		15 orang	150.000.000	Dana Alokasi Umum		10 orang	280.000.000
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		43 orang	150.000.000	Dana Alokasi Umum		86 orang	335.000.000
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		9 dokumen	9.160.852.877	-	-	9 dokumen	9.780.377.513
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 paket	200.000.000	Dana Alokasi Umum		12 paket	228.375.000
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 paket	218.741.400	Dana Alokasi Umum		12 paket	247.000.000
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 paket	200.000.000	Dana Alokasi Umum		12 paket	210.000.000

4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 paket	280.000.000	Dana Alokasi Umum		12 paket	300.000.000
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 paket	241.400.000	Dana Alokasi Umum		12 paket	250.000.000
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 dokumen	90.000.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	90.000.000
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		5 paket	35.000.000	Dana Alokasi Umum		5 paket	38.500.000
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 laporan	230.000.000	Dana Alokasi Umum		1 laporan	250.000.000
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 laporan	7.665.711.477	Dana Alokasi Umum		1 laporan	8.166.502.513

4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		44 unit	3.500.416.000	-	-	44 unit	2.730.000.000
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		4 unit	125.208.000	Dana Alokasi Umum		4 unit	130.000.000
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 unit	125.208.000	Dana Alokasi Umum		0 unit	550.000.000
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		15 unit	1.000.000.000	Dana Alokasi Umum		15 unit	500.000.000
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		25 unit	1.500.000.000	Dana Alokasi Umum		25 unit	500.000.000
4.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		4 unit	-	Dana Alokasi Umum		4 unit	100.000.000

4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0 unit	-	Dana Alokasi Umum		0 unit	-
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0 unit	500.000.000	Dana Alokasi Umum		1 unit	500.000.000
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 unit	250.000.000	Dana Alokasi Umum		2 unit	450.000.000
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7 laporan	2.744.567.660	-	-	7 laporan	2.784.177.660
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 laporan	10.140.000	Dana Alokasi Umum		1 laporan	25.750.000
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	480.000.000	Dana Alokasi Umum		1 laporan	504.000.000

4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 laporan	50.000.000	Dana Alokasi Umum		6 laporan	50.000.000
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5 laporan	2.204.427.660	Dana Alokasi Umum		6 laporan	2.204.427.660
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		127 unit	4.544.762.446			127 unit	2.705.000.000
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5 unit	40.000.000	Dana Alokasi Umum		5 unit	300.000.000

4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 unit	275.000.000	Dana Alokasi Umum		10 unit	650.000.000
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		25 unit	25.000.000	Dana Alokasi Umum		25 unit	100.000.000
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100 unit	300.000.000	Dana Alokasi Umum		100 unit	300.000.000
4.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		1 unit	5.000.000	Dana Alokasi Umum		1 unit	5.000.000
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	3.219.762.446	Dana Alokasi Umum		1 unit	500.000.000
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	350.000.000	Dana Alokasi Umum		1 unit	500.000.000

4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 unit	330.000.000	Dana Alokasi Umum		10 unit	350.000.000
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		35 orang	27.555.409.306			35 orang	27.295.409.306
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		35 OB	26.145.409.306	Dana Alokasi Umum		35 OB	26.145.409.306
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		6 paket	1.200.000.000	Dana Alokasi Umum		6 paket	800.000.000
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD		35 orang	210.000.000	Dana Alokasi Umum		35 orang	350.000.000
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD		13 dokumen	1.340.198.440			13 dokumen	1.057.178.840

4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		6 dokumen	1.190.198.440	Dana Alokasi Umum		6 dokumen	797.178.840
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		7 laporan	50.000.000	Dana Alokasi Umum		7 laporan	160.000.000
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		1 laporan	50.000.000	Dana Alokasi Umum		1 laporan	50.000.000
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		1 paket	50.000.000	Dana Alokasi Umum		1 paket	50.000.000
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		100%	14.341.187.083			100%	16.770.975.314
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		21 dokumen	1.954.000.000			21 dokumen	1.954.000.000

4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		5 dokumen	480.000.000	Dana Bagi Hasil		5 dokumen	480.000.000
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		6 dokumen	649.000.000	Dana Bagi Hasil		6 dokumen	649.000.000
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		5 dokumen	215.000.000	Dana Bagi Hasil		5 dokumen	215.000.000
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		4 dokumen	385.000.000	Dana Bagi Hasil		4 dokumen	385.000.000
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		1 dokumen	175.000.000	Dana Bagi Hasil		1 dokumen	175.000.000
4.02.02.2.01.06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah		50 Orang	50.000.000	Dana Bagi Hasil		50 Orang	50.000.000

4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran		7 dokumen	1.439.000.000			7 dokumen	1.444.450.000
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		1 dokumen	100.000.000	Dana Bagi Hasil		1 dokumen	100.000.000
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 dokumen	180.000.000	Dana Bagi Hasil		1 dokumen	180.000.000
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		1 dokumen	304.000.000	Dana Bagi Hasil		1 dokumen	304.000.000
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		1 dokumen	235.000.000	Dana Bagi Hasil		1 dokumen	240.450.000
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		2 dokumen	160.000.000	Dana Bagi Hasil		2 dokumen	160.000.000
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		1 dokumen	460.000.000	Dana Bagi Hasil		1 dokumen	460.000.000

4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		8 dokumen	777.700.000			8 dokumen	777.700.000
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum		1 laporan	66.750.000	Dana Bagi Hasil		1 laporan	66.750.000
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		1 laporan	66.750.000	Dana Bagi Hasil		1 laporan	66.750.000
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		1 laporan	67.200.000	Dana Bagi Hasil		1 laporan	67.200.000
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		1 laporan	65.700.000	Dana Bagi Hasil		1 laporan	65.700.000

4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		1 laporan	60.000.000	Dana Bagi Hasil		1 laporan	60.000.000
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		1 dokumen	85.000.000	Dana Bagi Hasil		1 dokumen	85.000.000
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		1 dokumen	76.300.000	Dana Bagi Hasil		1 dokumen	76.300.000
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		1 dokumen	290.000.000	Dana Bagi Hasil		1 dokumen	290.000.000
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD		10 dokumen	2.753.022.500			10 dokumen	2.133.022.500

4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		1 dokumen	500.000.000	Dana Bagi Hasil			
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		4 dokumen	1.500.000.000	Dana Bagi Hasil		4 dokumen	1.500.000.000
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		16 orang	133.022.500	Dana Bagi Hasil		16 orang	133.022.500
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		10 orang	380.000.000	Dana Bagi Hasil		16 orang	380.000.000
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		1 dokumen	25.000.000	Dana Bagi Hasil		1 dokumen	25.000.000
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		1 dokumen	25.000.000	Dana Bagi Hasil		1 dokumen	25.000.000
4.02.02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		1 dokumen	190.000.000	Dana Bagi Hasil		1 dokumen	70.000.000

4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen/laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		5 dokumen	3.108.600.000			5 dokumen	5.537.600.000
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		1 laporan	25.000.000	Dana Bagi Hasil		1 laporan	25.000.000
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		1 dokumen	522.600.000	Dana Bagi Hasil		1 dokumen	522.600.000
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		3 dokumen	2.511.000.000	Dana Bagi Hasil		3 dokumen	4.940.000.000
4.02.02.2.05.04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah		50 orang	50.000.000	Dana Bagi Hasil		50 orang	50.000.000
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		2 dokumen	372.015.314			2 dokumen	372.015.314
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		1 Dokumen	122.420.445	Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	122.420.445

4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		1 Laporan	249.594.869	Dana Bagi Hasil		1 Laporan	249.594.869
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah		2 Dokumen	425.000.000			2 Dokumen	425.000.000
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		1 dokumen	25.000.000	Dana Bagi Hasil		1 dokumen	25.000.000
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		1 dokumen	400.000.000	Dana Bagi Hasil		1 dokumen	400.000.000
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD		10 dokumen	3.511.849.269			10 dokumen	4.127.187.500
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		3 dokumen	1.461.147.269	Dana Bagi Hasil		3 dokumen	1.600.000.000
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		1 laporan	25.375.000	Dana Bagi Hasil		1 laporan	25.375.000

4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		1 dokumen	366.812.500	Dana Bagi Hasil		1 dokumen	501.812.500
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		1 dokumen	806.389.500	Dana Bagi Hasil		1 dokumen	1.000.000.000
4.02.02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		5 dokumen	852.125.000	Dana Bagi Hasil		5 dokumen	1.000.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Penetapan prioritas program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai perlu diselaraskan dengan perkembangan makro ekonomi dan perkembangan kehidupan nasional secara umum. Sedangkan perkembangan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap tri fungsi DPRD (fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan), yang dijadikan landasan terhadap penyusunan prioritas program kerja. Karena itu perencanaan program yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman, terhadap beberapa program yang masih perlu dilanjutkan, dikembangkan, bahkan diperluas cakupannya.

Dalam prioritas program yang akan dilaksanakan lebih bernuansa pada pemadatan program agar mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang berdampak atau memberi manfaat kepada pelayanan dan pemberian dukungan terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Dumai.

Memperhatikan masalah-masalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka pelayanan atas tugas pokok dan fungsi DPRD dapat mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, khususnya juga agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Kota Dumai, maka perlu ditentukan strategi dan kebijakan

yang dituangkan ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, yaitu sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan rutin yang menunjang urusan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain:

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :

1.1.1 Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.1.4 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.5 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1.1.6 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.7 Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari:

1.2.1 Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 1.2.2 Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.4 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 1.2.5 Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
- 1.3.1 Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.2 Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.3 Subkegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.4 Subkegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.3.5 Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
- 1.4.1 Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4.2 Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

- 1.4.3 Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 1.4.4 Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 1.4.5 Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4.6 Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari:
- 1.5.1 Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2 Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3 Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4 Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.5 Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.6 Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.5.7 Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - 1.5.8 Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.5.9 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
- 1.6.1 Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 1.6.2 Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.3 Subkegiatan Pengadaan Mebel
 - 1.6.4 Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.5 Subkegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - 1.6.6 Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.6.7 Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.6.8 Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
- 1.7.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3 Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.7.4 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
- 1.8.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 1.8.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.3 Subkegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 1.8.4 Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.5 Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - 1.8.6 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.8.7 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.8.8 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.9 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
- 1.9.1 Subkegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - 1.9.2 Subkegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - 1.9.3 Subkegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 1.10 Layanan Administrasi DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
- 1.10.1 Subkegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
 - 1.10.2 Subkegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD
 - 1.10.3 Subkegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - 1.10.4 Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui peningkatan keputusan/Perda yang ditetapkan oleh DPRD. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain:

2.1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, kegiatan ini terdiri dari :

- 2.1.1 Subkegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- 2.1.2 Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- 2.1.3 Subkegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
- 2.1.4 Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
- 2.1.5 Subkegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD
- 2.1.6 Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

2.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran, kegiatan ini terdiri dari :

- 2.2.1 Subkegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
- 2.2.2 Subkegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 2.2.3 Subkegiatan Pembahasan APBD
- 2.2.4 Subkegiatan Pembahasan APBD Perubahan
- 2.2.5 Subkegiatan Pembahasan Laporan Semester
- 2.2.6 Subkegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

2.3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan ini terdiri dari :

- 2.3.1 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
- 2.3.2 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- 2.3.3 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 2.3.4 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- 2.3.5 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
- 2.3.6 Subkegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- 2.3.7 Subkegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
- 2.3.8 Subkegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

2.4 Peningkatan Kapasitas DPRD, kegiatan ini terdiri dari :

- 2.4.1 Subkegiatan Orientasi DPRD
- 2.4.2 Subkegiatan Bimbingan Teknis DPRD
- 2.4.3 Subkegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- 2.4.4 Subkegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- 2.4.5 Subkegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- 2.4.6 Subkegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
- 2.4.7 Subkegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan

- 2.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, kegiatan ini terdiri dari :
 - 2.5.1 Subkegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah
 - 2.5.2 Subkegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - 2.5.3 Subkegiatan Pelaksanaan Reses
 - 2.5.4 Subkegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah

- 2.6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
 - 2.6.1 Subkegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD
 - 2.6.2 Subkegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD

- 2.7 Pembahasan Kerja Sama Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 - 2.7.1 Subkegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
 - 2.7.2 Subkegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

- 2.8 Fasilitasi Tugas DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
 - 2.8.1 Subkegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - 2.8.2 Subkegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - 2.8.3 Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - 2.8.4 Subkegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
 - 2.8.5 Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD SESUAI RENSTRA

No. Rek	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Lokasi	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Sekretariat DPRD	Sek. DPRD Kota Dumai		100%	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			16 dokumen	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	3 dokumen	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	2 dokumen	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	2 dokumen	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	2 dokumen	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	2 dokumen	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	4 Laporan	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 Laporan	Dana Alokasi Umum

4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah			12 dokumen	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Pegawai Sekretariat DPRD	45 Orang/bulan	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	2 Laporan	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	7 Laporan	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5 laporan	-
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	2 dokumen	Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	2 laporan	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4 dokumen	-
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Pegawai Sekretariat DPRD	1 paket	Dana Alokasi Umum

4.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Pegawai Sekretariat DPRD	1 dokumen	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Pegawai Sekretariat DPRD	15 orang	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Pegawai Sekretariat DPRD	86 orang	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			9 dokumen	-
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	12 paket	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	12 paket	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	12 paket	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	12 paket	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	12 paket	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	5 paket	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 laporan	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 laporan	Dana Alokasi Umum

4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			44 unit	-
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 unit	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 unit	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	15 unit	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	25 unit	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	2 unit	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7 laporan	-
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 laporan	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 laporan	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	5 laporan	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			127 unit	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	5 unit	Dana Alokasi Umum

4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	10 unit	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	100 unit	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 unit	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 unit	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	10 unit	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			35 orang	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		Anggota DPRD	35 OB	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		Anggota DPRD	6 paket	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD		Anggota DPRD	35 orang	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD			13 dokumen	
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Anggota DPRD	6 dokumen	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		Anggota DPRD	7 laporan	Dana Alokasi Umum
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			100%	

4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			21 dokumen	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	5 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	6 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	5 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	4 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.01.06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran			7 dokumen	-
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 dokumen	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Bagi Hasil

4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	2 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			8 dokumen	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 laporan	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 laporan	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 laporan	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 laporan	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 laporan	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD			10 dokumen	-

4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		Anggota DPRD	4 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Anggota DPRD	16 orang	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		Anggota DPRD	10 orang	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen/laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			5 dokumen	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 laporan	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		Anggota DPRD	3 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.05.04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	50 orang	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			2 dokumen	
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		Anggota DPRD	1 Dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		Anggota DPRD	1 Laporan	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah			2 Dokumen	

4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD			10 dokumen	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	3 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		Anggota DPRD	1 laporan	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Anggota DPRD	1 dokumen	Dana Bagi Hasil
4.02.02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	5 dokumen	Dana Bagi Hasil

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dokumen Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2024 sesuai dengan fungsinya yaitu merupakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan masing-masing bagian, di mana Renja ini disusun dengan memperhatikan kondisi objektif baik menyangkut kompetensi personal, kemampuan anggaran, kewenangan yang dimiliki serta situasi yang terjadi. Sehubungan dengan itu maka semua unit kerja (bagian) di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Dumai diharapkan dapat mempedomani Renja ini.

Indikator keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat tergantung kepada komitmen yang telah disepakati serta konsisten dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga sasaran program pembangunan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

B. SARAN

1. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif baik internal maupun eksternal.
2. Menambah personil Sekretariat DPRD terutama yang kompeten dalam perencanaan dan program.
3. Meningkatkan kualitas SDM pada Sekretariat DPRD dengan mengikutsertakan dalam berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan.

Dumai, Juli 2023
Sekretaris DPRD Kota Dumai


HADIYONO, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19710605 199903 1 013